

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas perkenanNya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana kepada Gubernur Bangka Belitung selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Laporan Kinerja memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana beserta seluruh jajaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program secara keseluruhan dapat melebihi target yang telah ditetapkan, hanya satu indikator kinerja persentasi tingkat kesertaan ber-KB belum dapat tercapai. Dengan penuh kesadaran hal tersebut akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran khususnya pada Bidang PPKB untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang.

Pangkalpinang, 27 Januari 2020

Kepala Dinas,



Dra. SUSANTI, M.AP.

NIP. 19650713 199203 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melaksanakan lima program dengan sembilan sasaran program dan sebelas Indikator Kinerja Program (*Outcome*). Rata-rata capaian kinerja outcome adalah sebesar 169,34% yang dihitung berdasarkan indikator:

1. Status Penilaian Kinerja diperoleh predikat BB dengan nilai hasil evaluasi 76,19 atau mencapai 118,00% dari target 64,57% (tahun sebelumnya).
2. Persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sebesar 0,90% atau mencapai 109,76% dari target 0,82%.
3. Persentase PD yang melaksanakan PPRG, sebesar 68,75% atau mencapai 244,49% dari target 28,12%.
4. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi, sebesar 11,16% atau mencapai 507,27% dari target 2,20%.
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani, sebesar 100% atau mencapai 100% dari target 100%.
6. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani, sebesar 100% atau mencapai 100% dari target 100%.
7. Persentase capaian Tahapan Provinsi Layak Anak, sebesar 57,14% atau mencapai 200% dari target 28,57%.
8. Persentase PD Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan, sebesar 25% atau mencapai 100% dari target 25%.
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan, sebesar 85,71% atau mencapai 116,61% dari target 73,50%.
10. Persentase tingkat kesertaan ber-KB, sebesar 65,08% atau mencapai 94,46% dari target 68,90%
11. Persentase Kampung KB yang terbentuk, sebesar 76,62% atau mencapai 172,18% dari target 44,50%.

Capaian kinerja *outcome* menunjukkan rata-rata sebesar 169,34%. Dana yang digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp13.998.035.030,- atau 85,78% dari anggaran sebesar Rp16.317.955.087,-.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia dan Aset Perangkat Daerah	6
E. Isu-Isu Strategis	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan	14
B. Rencana Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	57
D. Analisis Keuangan dengan Pencapaian Kinerja	58
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	
Rencana Kinerja Tahunan	
Penetapan Kinerja	
Pengukuran Kinerja Tahunan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode 2017-2022, berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pencapaian target dimaksud dapat diwujudkan dengan adanya kekuatan komitmen segenap jajaran perangkat daerah pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja yang mendukung agenda pembangunan daerah.

Guna mewujudkan hal itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Rencana Kerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

B. Tujuan dan Manfaat

Dokumen LAKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LAKIP bertujuan untuk:

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat (unit kerja yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah/*stakeholders* yang berkepentingan).
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan.
5. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan organisasi dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi, dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.
6. Memberikan masukan untuk perbaikan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Sedangkan manfaat LAKIP adalah :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).
2. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengamanatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

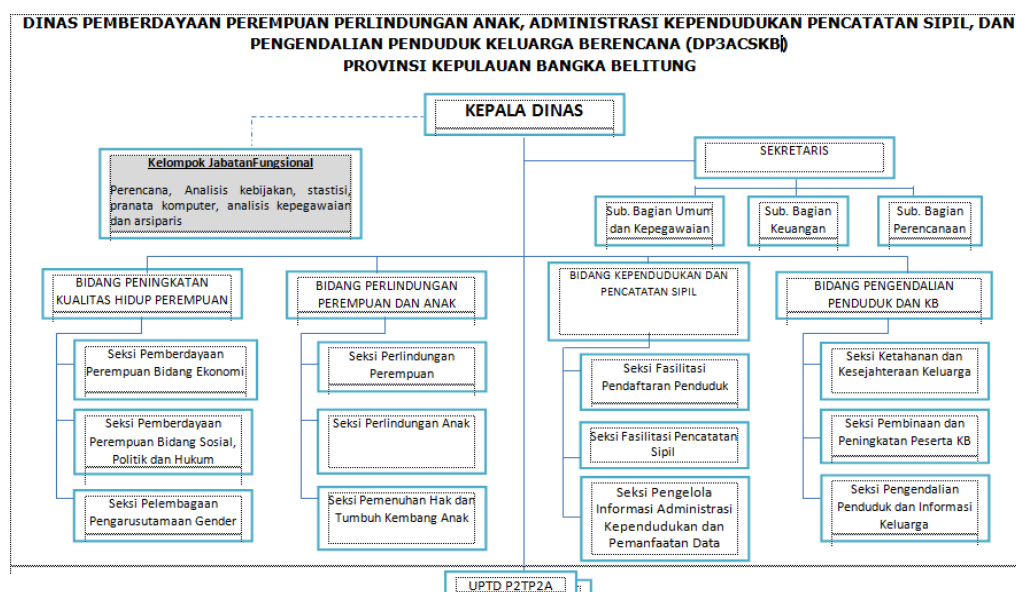
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;

- b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan:
- a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahkan:
- a. Seksi Fasilitas Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penanganan Pelayanan, Pengaduan Informasi dan Kerjasama
 - c. Seksi Tindakan dan Rujukan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

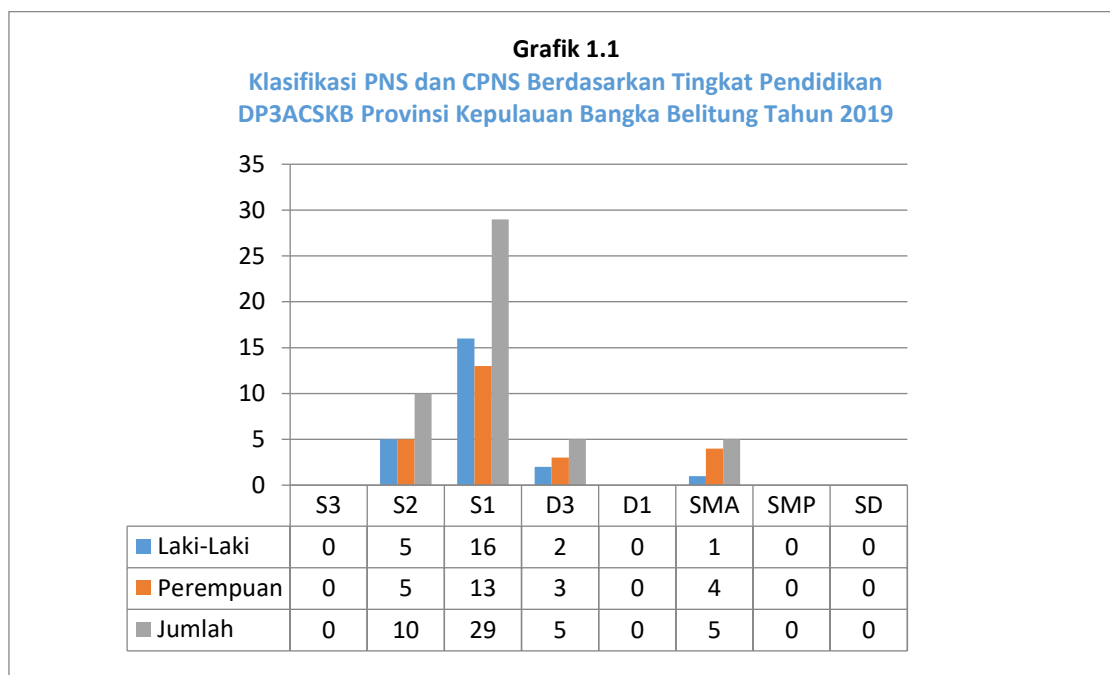
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :



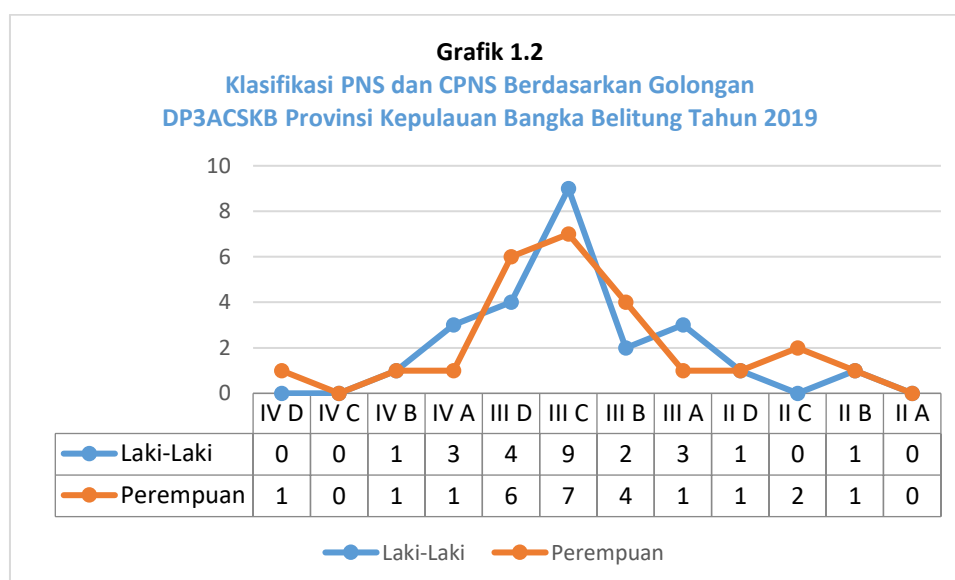
D. Sumber Daya Manusia dan Aset Perangkat Daerah

Sumber daya yang merupakan salah satu faktor kekuatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sumber daya manusia dan aset sarana prasana.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 didukung sebanyak 49 PNS. Adapun klasifikasi PNS dan CPNS berdasarkan tingkat pendidikan selama tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:

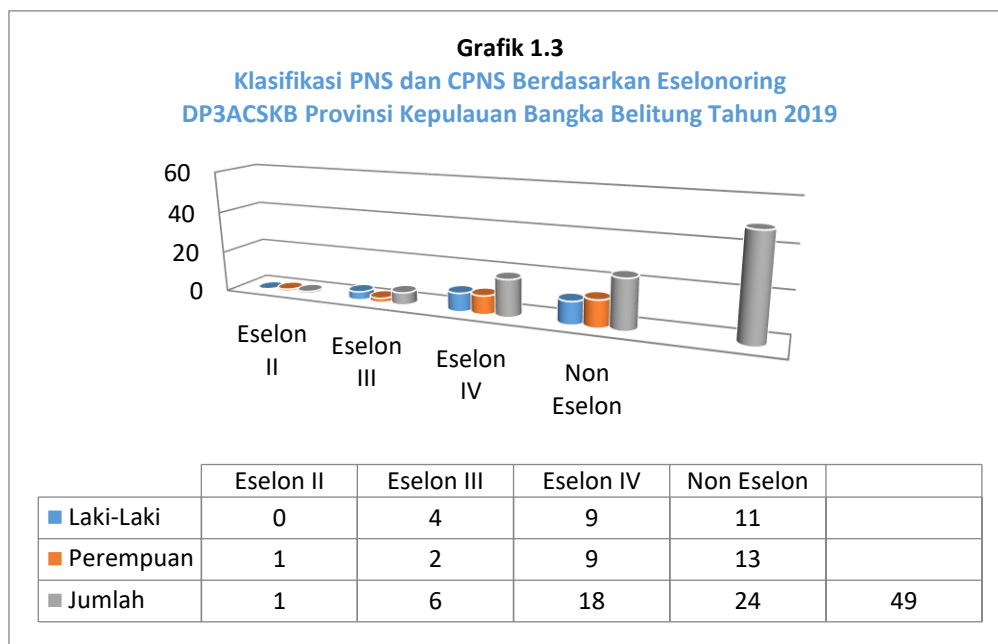


Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lulusan Strata-1 sebanyak 29 orang. Sedangkan klasifikasi PNS dan CPNS berdasarkan golongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.2 berikut:



Grafik di atas menggambarkan bahwa golongan yang paling rendah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah golongan II c dan yang paling tinggi adalah golongan IV d, sedangkan sebagian besar dari pegawai berada pada posisi golongan III c. Jika ditinjau dari klasifikasi PNS dan CPNS berdasarkan eselonoring dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut:



Sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sarana prasarana atau aset perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.4.
Asset Peralatan dan Mesin
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s/d Tahun 2019

NO	Nama Asset	Tahun pembelian	Kondisi	Total
1	Gedung Pos Jaga Permanen	2006	B	1
2	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	2007	B	1
3	Sepeda Motor	2008	4 (B)	4

4	Mesin Ketik Standar (14 - 16)	2008	1 (B), 1 (KB)	2
5	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2008	1(KB)	1
6	Lemari Besi	2008	7 (B)	7
7	Filling Besi/Metal	2008	11 (B) 1 (KB)	12
8	Peti Uang	2008	1 (B)	1
9	Lemari Kaca	2008	3 (B)	3
10	Alat Penghancur Kertas	2008	1(KB) 1 (RB)	2
11	Papan Nama Instansi	2008	2(B)	2
12	White Board	2008	3 (B)	3
13	Mesin Absensi	2008	1 (RB)	1
14	Rak Kayu	2008	2 (B)	2
15	Meja Komputer	2008	6 (B), 1 (KB)	7
16	Tikar	2008	1 (B)	1
17	Sofa	2008	1 (B)	1
18	Lemari Es	2008	1 (B)	1
19	Kipas Angin	2008	3 (KB)	3
20	Kompas gas	2008	1(B)	1
21	Tabung Gas	2008	2 (B)	2
22	Televisi	2008	2(B)	2
23	Unit Power Supply	2008	1(B) 1 (KB)	2
24	Lambang Garuda Pancasila	2008	2 (B)	2
25	PC Unit/ Komputer PC	2008	6 (B), 5 (RB)	11
26	Note Book	2008	2 (B)	2
27	Printer	2008	10 (B), 4 (RB)	14
28	Scanner	2008	2 (B)	2
29	Meja Eselon II	2008	2 (B)	2
30	Meja Eselon III	2008	5 (B)	5
31	Meja Eselon IV	2008	11 (B)	11
32	Meja Kerja Pegawai non struktural	2008	24 (B) 1 (RB)	25
33	Meja Rapat Eselon II	2008	1 (B)	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2008	1 (B)	1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	5 (B)	5
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	11 (B)	11
37	Kursi Kerja Pegawai Non structural	2008	33 (B) 1 (KB)	34
38	Kursi Rapat Ruangan Staf	2008	20 (B)	20
39	Proyektor + Attachment	2008	1 (B)	1
40	Facsimile	2008	1 (KB)	1
41	Bangunan Menara Komunikasi lain-lain	2008	1(B)	1
42	Tugu Pembangun	2008	4 (B)	4
43	Jam Mekanis	2009	5 (B)	5
44	Alat Dapur Lainnya	2009	1 (B)	1
45	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2011	1 (B)	1
46	PC Unit/ Komputer PC	2011	1 (B)	1

47	Router	2011	1 (B)	1
48	Antene	2011	1 (B)	1
49	Lemari Besi	2013	1 (B)	1
50	Filling Besi/Metal	2013	6 (B)	6
51	White Board	2013	2 (B)	2
52	Meja Komputer	2013	2 (B)	2
53	Meja Biro	2013	5 (B) 1 (KB)	6
54	Unit Power Supply	2013	2 (B)	2
55	PC Unit/ Komputer PC	2013	2 (B)	2
56	Note Book	2013	4 (B)	4
57	Hard Disk	2013	1 (B)	1
58	Peralatan Komputer Mainframe lain-lain (Sandisk)	2013	2 (B) 1 (RB)	3
59	Printer	2013	6 (B) 1 (RB)	7
60	Peralatan Komputer Mainframe lain-lain (Mouse)	2013	4 (B)	4
61	Modem	2013	1 (B)	1
62	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1 (RB)	1
63	Kursi Kerja Pegawai Non structural	2013	17 (B)	17
64	Camera + Attachment	2013	1 (B)	1
65	Mesin Ketik elektronik	2014	1 (B)	1
66	Lemari Besi	2014	4 (B)	4
67	Filling Besi/Metal	2014	5 (B)	5
68	White Board	2014	2 (B)	2
69	Meja Komputer	2014	2 (B)	2
70	Meja Biro	2014	5 (B)	5
71	Unit Power Supply	2014	2 (B)	2
72	PC Unit/ Komputer PC	2014	2 (B)	2
73	Note Book	2014	5 (B)	5
74	Peralatan Komputer mainframe lain-lain(Flash disk)	2014	1 (KB) 1 (RB)	2
75	Printer	2014	2 (B)	2
76	Keyboard	2014	7 (B)	7
77	Peralatan personal Komputer Lain-lain	2014	3 (B)	3
78	Hard Disk Eksternal	2014	4 (B) 1 (RB)	5
79	Modem	2014	2 (B)	2
80	Peralatan Jaringan Lain-lain	2014	1 (B)	1
81	Switch Hub	2014	2 (B)	2
82	Wireless Access Point	2014	1 (B)	1
83	Meja Kerja Pejabat eselon II	2014	1 (B)	1
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2014	1 (B)	1
85	Kursi Kerja Pegawai Non structural	2014	7 (B)	7
86	Kursi Rapat Ruangan Staf	2014	10 (B)	10
87	Handycam	2014	1 (B)	1

88	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2015	2 (B)	2
89	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2015	1 (B)	1
90	Lemari Besi	2015	1 (B)	1
91	Filling Besi/Metal	2015	6 (B)	6
92	Papan Pengumuman	2015	1 (B)	1
93	Alat Pemotong kertas	2015	3(B)	3
94	Bangku Tunggu	2015	2 (B)	2
95	Lemari Es	2015	1 (B)	1
96	Kompor Gas	2015	1 (B)	1
97	Dispenser	2015	6 (B)	6
98	Note Book	2015	2 (B)	2
99	Printer	2015	2 (B)	2
100	Scanner	2015	2 (B)	2
101	Kursi Rapat Ruangan Staf	2015	10 (B)	10
102	Proyektor + Attachment	2015	1 (B)	1
103	Facsimile	2015	1 (B)	1
104	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2015	1 (B)	1
105	Gedung Pos Jaga Permanen	2015	1 (B)	1
106	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2016	1 (B)	1
107	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2016	2 (B)	2
108	Kompor Gas	2016	1 (B)	1
109	Alat Dapur Lainnya	2016	1 (B)	1
110	Televisi	2016	1 (B)	1
111	Sepeda Motor	2017	2 (B)	2
112	Mesin Absensi (Time Recorder)	2017	1 (B)	1
113	Lemari Besi	2017	9 (B)	9
114	Filling Besi/Metal	2017	11 (B)	11
115	Meja Biro	2017	5 (B)	5
116	Unit Power Supply	2017	2 (B)	2
117	Printer	2017	4 (B)	4
118	PC Unit/ Komputer PC	2018	4 (B)	4
119	Note Book	2018	3 (B)	3
120	Printer	2018	2 (B)	2
121	Scanner	2018	1 (B)	1
122	Server	2018	1 (B)	1
123	Meja Kerja Pegawai non struktural	2018	2 (B)	2
124	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	2018	2 (B)	2
125	Sofa	2019	1 (B)	1
126	Lemari Es	2019	1 (B)	1
127	Note Book (Laptop)	2019	2 (B)	2
128	Printer	2019	3 (B)	3
129	Meja Kerja Pejabat eselon V	2019	3 (B)	3

130	Kursi Kerja Pejabat eselon V	2019	3 (B)	3
131	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2019	1 (B)	1

*RB = Rusak Berat, B = Baik, KB = Kurang Baik

E. Isu-Isu Strategis

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Hal ini jika disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak-hak anak juga menjadi isu strategis untuk urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Kondisi tersebut diiringi dengan masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dimana hal ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi indikator kinerja Kepala Daerah untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah memiliki data yang akurat dan valid. Oleh karena itu, isu strategis yang masih menjadi persoalan pada

urusan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga harus segera diwujudkan dengan melakukan sinergisitas antar lintas sektor terkait.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, aset serta sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tujuan, sasaran, kebijakan pembangunan dan rencana kinerja tahun 2019.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, realisasi keuangan, analisis keuangan dengan pencapaian kinerja tahun 2019.

BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah kedepan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- A. Rencana Kinerja Tahunan
- B. Penetapan Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja Tahunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Pembangunan

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 telah ditetapkan visi yaitu “PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah;
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tahun 2017-2022 ini merupakan tahap lima tahun ketiga yang difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Untuk mewujudkan fokus rencana pembangunan tersebut, maka Gubernur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misi periode 2017-2022 yaitu **"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"**, dengan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada misi ke-3 (tiga), **"Meningkatkan Kualitas SDM YANG UNGGUL DAN HANDAL"** dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dengan sasaran :
"Meningkatkannya Keadilan dan kesetaraan Gender di segala Aspek Pembangunan"
2. Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya Kesejahteraan dan partisipasi Anak dalam pembangunan
4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Adapun Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan indikator kinerja adalah status penilaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, dengan indikator kinerja yaitu persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga;
 - b. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan indikator tujuan yaitu persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG;
 - c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, dengan indikator tujuan yaitu persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi;
 - d. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, dengan indikator tujuan yaitu persentase kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi yang ditangani.
3. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, dengan indikator tujuan yaitu persentase kasus kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi yang ditangani.
 - b. Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak, dengan indikator kinerja yaitu persentase capaian tahapan Provinsi Layak Anak.
4. Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan dan sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya dayaguna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan;
 - b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan.
5. Meningkatnya peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan sasarnya adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dimana indikator kinerjanya sebagai berikut:
 - a. Persentase tingkat kesertaan ber-KB;
 - b. Persentase Kampung KB.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program.

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, meliputi penetapan program dan serangkaian

kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3ACSKB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DP3ACSKB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3ACSKB. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PERIODE 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, disiplin aparatur, budaya kerja, penyediaan sarana dan prasarana serta ketrampilan pemanfaatan teknologi pendukung pencapaian	Peningkatan kinerja dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM, budaya kerja dan pelayanan optimum

		optimalisasi kinerja	
Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Meningkatkan capaian peran perempuan dalam ekonomi keluarga melalui peningkatan persentase industri rumahan	Koordinasi dengan instansi yang memiliki fungsi pada peningkatan ekonomi terkait pengembangan industri rumahan
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG	Meningkatkan kualitas PUG melalui peningkatan persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Peningkatan kualitas PUG dengan fokus pendampingan kepada perangkat daerah yang melaksanakan PPRG
	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan capaian pemberdayaan perempuan melalui persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi	Peningkatan capaian pemberdayaan perempuan dengan fokus pendampingan pada perempuan di lembaga/organisasi
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan fokus pada implementasi kebijakan, penanganan kekerasan dan sosialisasi
Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak termasuk TPPO	Peningkatan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dengan fokus pada implementasi kebijakan, penanganan kekerasan dan pemenuhan hak anak
	Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Meningkatkan capaian tahapan Provinsi Layak Anak	Peningkatan pencapaian menuju provinsi layak anak dengan fokus pada status pencapaian

			kab/kota layak anak
Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan Dokumen kependudukan dan pembangunan	Tercapainya dayaguna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan Pembangunan	Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi melalui pemanfaatan database oleh perangkat daerah provinsi	Peningkatan pendayagunaan database kependudukan dengan fokus pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan database kependudukan
		Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dengan fokus capaian kab/kota yang mencapai target kepemilikan
Meningkatnya peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan capaian kesertaan ber-KB	Peningkatan capaian kesertaan ber-KB dengan fokus pada aksesibilitas masyarakat dalam menerima pelayanan KB
		Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan peran kab/kota dengan fokus percepatan pembentukan dan pengembangan desa/kampung menjadi kampung KB

B. Rencana Kinerja

Dalam rangka mendukung implementasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan sebanyak 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) sasaran strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Rencana kinerja tersebut dijabarkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi. Perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019 yang tergambar pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja DP3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Status penilaian kinerja	Nilai	B	B	B	B	B	B+	B+
2.	Persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga	%	0,04	0,43	0,82	1,20	1,59	1,98	1,98
3.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	15,62	21,87	28,12	34,37	40,62	46,87	46,87
4.	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi	%	2,13	2,17	2,20	2,23	2,26	2,29	2,29
5.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase capaian tahapan provinsi layak anak	%	14,28	14,28	28,57	28,57	42,85	42,85	42,85
7.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan	%	6,25	15,62	25,00	34,37	43,75	53,12	53,12
9.	Persentase kab/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	%	67,93	69,50	73,50	77,50	81,50	85,50	85,50
10.	Persentase tingkat kesertaan ber-KB	%	68,00	68,20	68,90	69,60	70,30	71,00	71,00
11.	Persentase Kampung KB yang terbentuk		13,81	29,16	44,50	59,85	75,19	90,54	90,54

Indikator kinerja di atas, khususnya indikator kinerja tahun 2019, diimplementasikan pada rencana aksi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang digambarkan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Kinerja
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program dan Kegiatan		Anggaran	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Pagu	Pagu Perubahan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.027.193.250	Rp 2.591.193.250
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 74.050.000	Rp 80.050.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp 75.400.000	Rp 75.400.000
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29.160.000	Rp 29.160.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp 223.320.000	Rp 178.930.000
	Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	Rp 204.900.000	Rp 204.900.000
	Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Rp 84.800.000	Rp 84.800.000
	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota	Rp 57.112.000	Rp 54.612.000
	Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 22.020.000	Rp 20.070.000
	Pemetaan Industri Rumah Tangga di Kab/Kota	Rp 7.650.000	Rp 7.650.000
	Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif		Rp 150.000.000
	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender		Rp 48.840.000
Program Peningkatan Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Forum Anak)	Rp 186.620.000	Rp 186.620.000
	TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota	Rp 218.020.000	Rp 218.020.000
	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kep. Bangka Belitung	Rp 273.475.000	Rp 273.475.000
	Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Rp 243.025.000	Rp 393.025.000

	Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Rp	43.550.000	Rp	113.550.000
	Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Rp	214.459.000	Rp	214.459.000
	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	Rp	28.920.000	Rp	28.920.000
	Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak			Rp	80.000.000
Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kep. Babel	Rp	227.427.500	Rp	227.427.500
	Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kep. Babel	Rp	29.350.000	Rp	29.350.000
	Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Rp	386.000.000	Rp	386.000.000
	Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kab/Kota (DAK)	Rp	130.000.000	Rp	130.000.000
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp	220.691.000	Rp	220.691.000
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000
	Pengembangan Bank Data Kependudukan	Rp	42.847.500	Rp	42.847.500
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	Rp	1.225.000.000	Rp	-
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Rp	105.650.000	Rp	28.650.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur (DAK)	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk			Rp	150.000.000
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	Rp	258.424.850	Rp	258.424.850
	Advokasi dan KIE Program KKBPK	Rp	35.012.500	Rp	33.370.000
	Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Rp	158.200.000	Rp	136.320.668
	Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Rp	230.870.000	Rp	404.391.300
	Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	Rp	19.950.000	Rp	19.950.000
	Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	Rp	144.909.000	Rp	144.909.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari aspek keuangan, sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menetapkan 9 (sembilan) sasaran program dengan 11 indikator kinerja program. Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	2022
1	Meningkatnya Nilai Capaian LAKIP	Status Penilaian Kinerja	B	B	BB	BB	BB
2	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga	146.51	0.82	0.90	109.76	1.98
3	Meningkatnya kapasitas PD dalam pelaksanaan PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	285.78	28.12	68.75	244.49	46.87
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/ organisasi	101.84	2.20	11.16	507.27	2.29
5	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak	100.00	28.57	57.14	200.00	42.85
8	Meningkatnya dayaguna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan	120.04	25.00	25.00	100.00	53.12
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	109.33	73.50	85.71	116.61	85.50
9	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase tingkat kesertaan ber-KB	100.44	68.90	65.08	94.46	71.00
		Persentase Kampung KB yang terbentuk	96.02	44.50	76.62	172.18	90.54
Rata-rata Capaian						169.34	

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menetapkan 9 (sembilan) sasaran program dengan 11 indikator kinerja program yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir periode Renstra adalah sebagai berikut:

“Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Nilai Capaian LAKIP

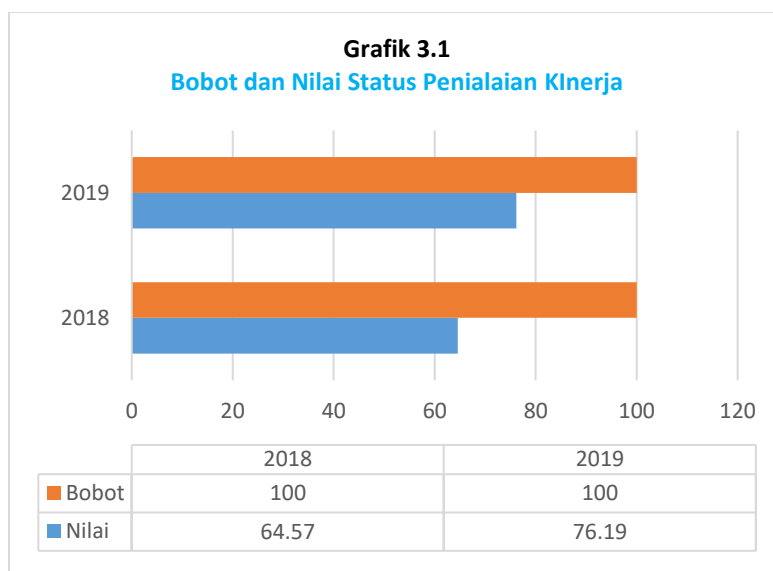
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatnya Nilai Capaian LAKIP adalah Status Penilaian Kinerja yang merupakan hasil dari evaluasi terhadap pelaporan kinerja agar dapat mengarah kepada kualitas implementasi.

Realisasi kinerja tahun 2019 diperoleh nilai hasil evaluasi berjumlah 76,15 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja berpredikat BB melampaui dari target dengan nilai B. Realisasi ini merupakan hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, ada 5 (lima) komponen yang dinilai, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30; (2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 25; (3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15; (4) Evaluasi Kinerja dengan bobot 10; dan (5) Capaian Kinerja dengan bobot 20. Sehingga total bobot berjumlah 100.

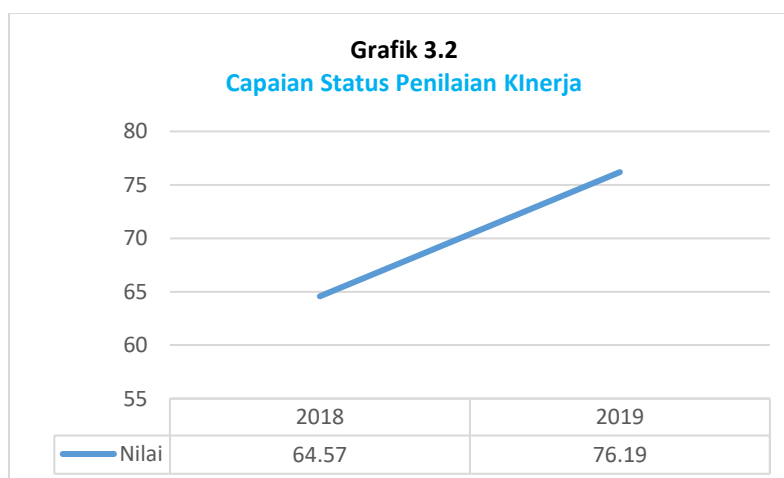
Realisasi kinerja tahun 2019 bernilai 76,15 (BB) nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni bernilai 64,57 (B) dengan harapan masih dapat dipertahankan sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2022 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat membentuk tim kerja dengan baik.

Perbandingan nilai hasil evaluasi dengan bobot dari setiap kriteria dari 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dari Grafik 3.1 berikut:



Meningkatnya nilai capaian LAKIP dari tahun 2018 ke tahun 2019 ada penambahan bobot sebanyak 11,62 poin atau hampir sebesar 118%, dapat dilihat Grafik 3.2 berikut:



“Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga

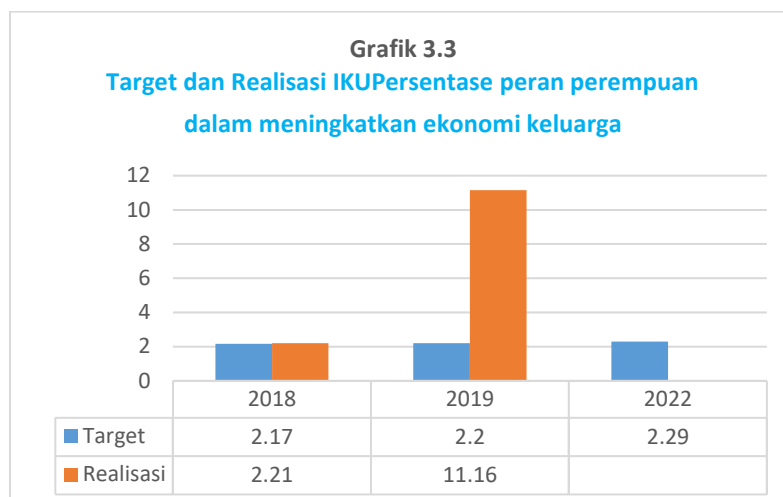
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatkan Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga adalah persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, merupakan bentuk terkecil dari usaha perempuan yang dapat membantu keluarga dalam menambah penghasilan rumah tangga sehingga dapat memberdayakan perempuan, dapat didefinisikan sebagai Industri Rumahan (IR) yang merupakan bagian kecil dari sekian banyak dari perempuan produktif disektor formal maupun informal.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 0,90% dibandingkan dengan target sebesar 0,82% atau mencapai 109,76%. Realisasi ini dihitung berdasarkan penambahan jumlah dari pelaku Industri Rumahan (IR) dibandingkan dengan jumlah perempuan yang produktif.

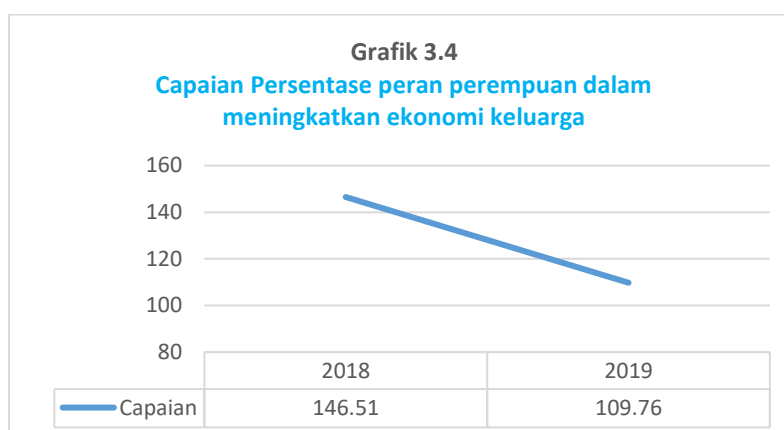
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 0,90% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 0,82% namun masih kurang sebesar 1,08% dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 1,98%.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya berbagai program baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana maupun dari pemerintah pusat yang melakukan pendampingan dan pembekalan kewirausahaan.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.3. berikut:



Dari Grafik 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari realisasi tahun sebelumnya, namun perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat menurun, dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut:



Dari Grafik 3.4 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018, namun masih melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga salah satunya adalah sering melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap perempuan untuk produktif agar menghasilkan sesuatu produk yang dapat dijual untuk menambah penghasilan bagi rumah tangganya.

Pencapaian IKU Persentase peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga tahun 2019 didukung penggunaan dana dari berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Pembinaan dan money pelaksanaan program IR perempuan di kabupaten/kota, sebesar Rp53.167.000,- atau 97,35% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp57.112.000,-, dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 109,76% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 97,35%.
- b. Pemetaan Industri Rumahan di kabupaten/kota, sebesar Rp7.650.000,- atau 100% dari anggaran tersedia, dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD Perubahan, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 109,76% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 100%.

Secara agregat sasaran ini juga dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 109,76% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 97,68%.

“Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kapasitas PD dalam Pelaksanaan PPRG

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah dalam Pelaksaan PPRG adalah persentase penambahan dari PD yang telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

PPRG merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan serta bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja yang pengelolaan anggarannya menggunakan analisis gender pada input,

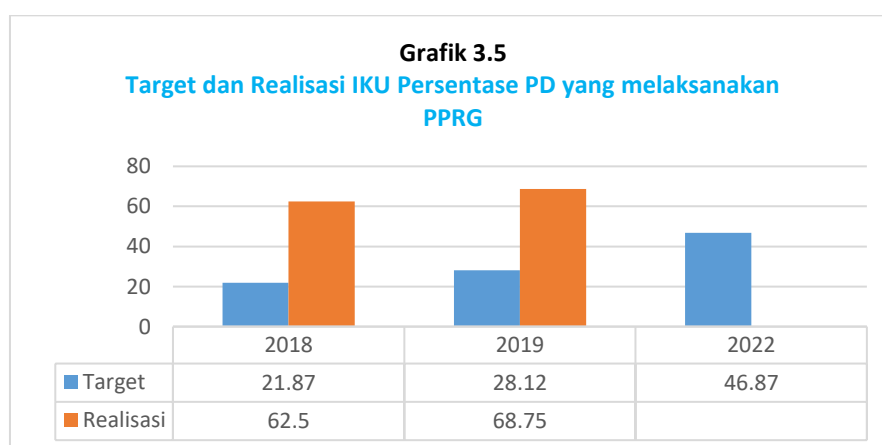
output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan sebagai indikator kinerja.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 68,75% dibandingkan dengan target sebesar 28,12% atau mencapai 244,49%. Realisasi ini dihitung berdasarkan penambahan jumlah dari Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PPRG dibandingkan dengan jumlah semua Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 68,75% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 62,50% dan telah melampaui target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 46,87%.

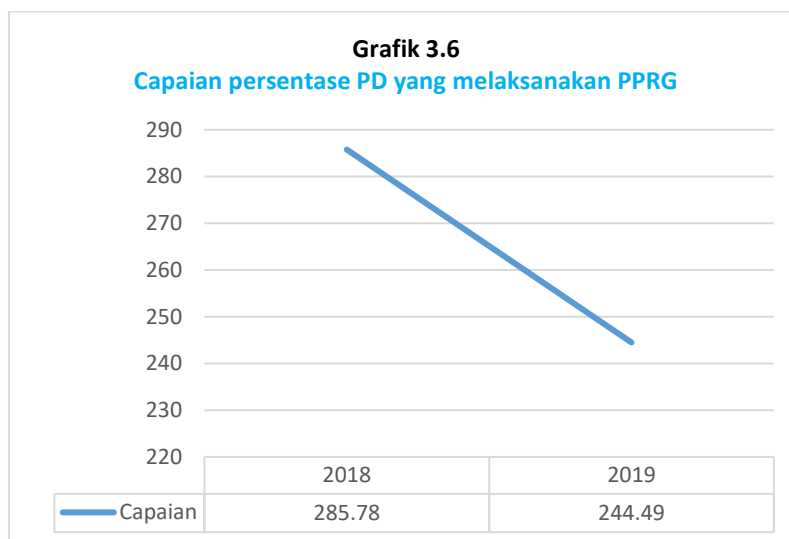
Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya berbagai upaya baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana maupun dari PD driver yang sangat aktif dalam mengadvokasi dan membimbing PD yang ada.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.5. berikut:



Dari Grafik 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari realisasi tahun sebelumnya, begitu juga perkembangan capaian tahun

2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat meningkat, dapat dilihat pada Grafik 3.6 berikut:



Dari Grafik 3.6 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018, namun masih melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam peningkatan jumlah PD yang telah melaksanakan PPRG salah satunya adalah sering melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap PD untuk melaksanakan PPRG bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja yang pengelolaan anggarannya menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan sebagai indikator kinerja.

Pencapaian IKU Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG tahun 2019 didukung penggunaan dana dari berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG, sebesar Rp65.995.200,- atau 77,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp84.800.000,-, yang besumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 244,49% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 77,82%.

- b. Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, sebesar Rp20.070.000,- atau 100% dari anggaran tersedia, yang bersumber dari APBD Perubahan, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 244,49% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 100%.
- Secara agregat sasaran ini juga dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 109,76% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 82,07%.

“Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga tidak lagi menjadi subordinasi dan menjadi mitra sejajar dengan kaum pria.

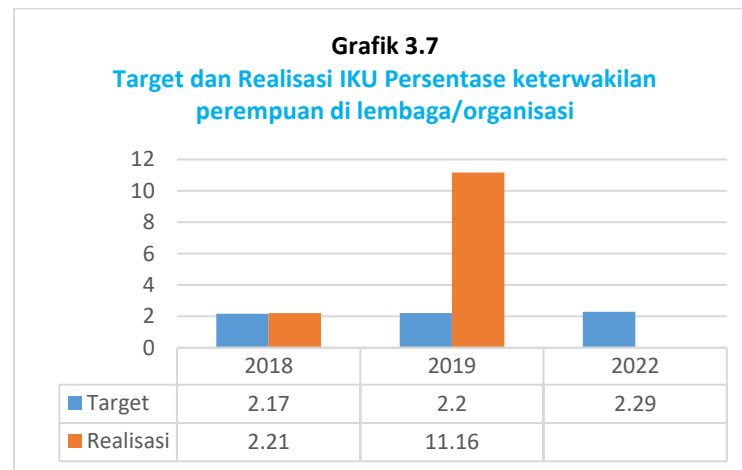
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 11,16% dibandingkan dengan target sebesar 2,02% atau mencapai 507,27%. Realisasi ini dihitung berdasarkan penambahan jumlah keterwakilan perempuan yang menduduki pos-pos jabatan dapat mengambil keputusan pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif pada organisasi perempuan dibandingkan dengan jumlah semua perempuan yang bekerja pada lembaga dan organisasi tersebut yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 11,16% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 2,21% dan telah

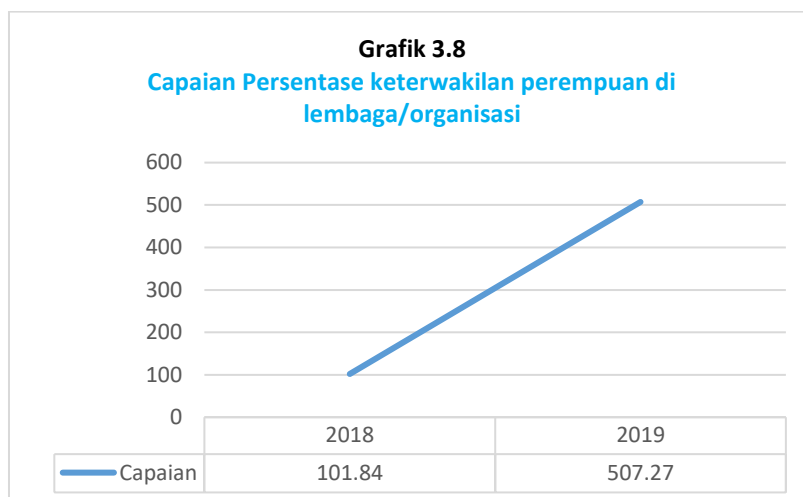
melampaui target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 2,29%.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.7. berikut:



Dari Grafik 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 melampaui jauh dari target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari realisasi tahun sebelumnya, begitu juga perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat meningkat, dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut:



Dari Grafik 3.8 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 maupun dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang menduduki pos-pos jabatan yang dapat mengambil keputusan pada lembaga pemerintah baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan porsi keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Pencapaian IKU Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga/Organisasi tahun 2019 didukung penggunaan dana dari berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif, sebesar Rp132.437.200,- atau 88,29% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp150.000.000,- dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD Perubahan, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 507,27% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 88,29%.
- b. Pembinaan organisasi perempuan, sebesar Rp168.234.800,- atau 94,02% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp178.930.000,-, dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara

efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 507,27% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 94,02%.

- c. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender, sebesar Rp42.857.300,- atau 87,75% dari anggaran tersedia sebesar Rp48.840.000,- dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD Perubahan, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 507,27% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 87,75%.
- d. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia, sebesar Rp144.410.000,- atau 70,48% dari anggaran tersedia sebesar Rp204.900.000,- dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 507,27% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 70,48%.

Secara agregat sasaran ini juga dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 507,27% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 83,74%.

“Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan adalah persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan merupakan upaya untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender dalam bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan

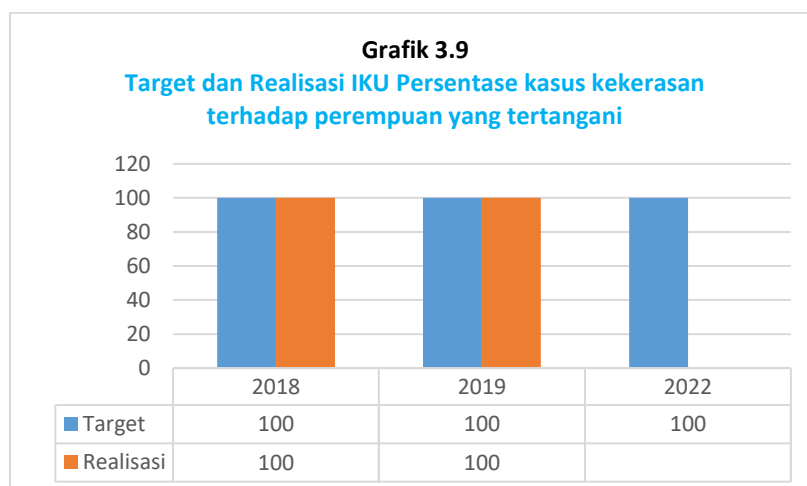
kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman, pemaksaan serta bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Realisasi kinerja tahun 2019 dapat memenuhi target sebesar 100% dan dengan capaian sebesar 100%. Realisasi ini dihitung berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat ditangani tuntas sebanyak 61 kasus dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan 61 kasus yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

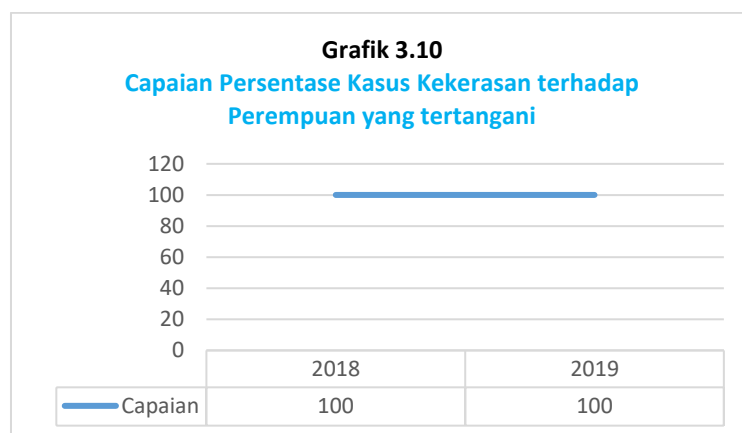
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 100% sama dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 100%, dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan menurun dari tahun 2018 sebanyak 80 kasus dan tahun 2019 menjadi 61 kasus, dengan harapan setiap kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan tuntas dan semakin berkurang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada akhir periode Renstra tahun 2022.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan dinas terkait di kabupaten/kota serta lembaga masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.9. berikut:



Dari Grafik 3.9 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yakni 100%, begitu juga perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sama, dapat dilihat pada Grafik 3.10 berikut:



Dari Grafik 3.10 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 sama dengan dengan capaian tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung selalu tercapainya kinerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini karena adanya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selalu melakukan koordinasi dengan dinas atau unit yang terkait di kabupaten/kota.

Pencapaian IKU Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani tahun 2019 didukung penggunaan dana dari kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan, sebesar Rp260.603.254 atau 66,31% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp393.025.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 66,31%.

“Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

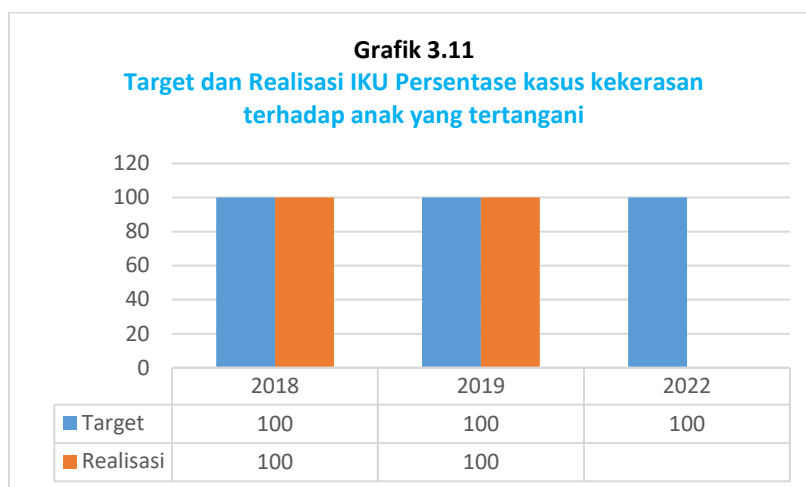
Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan merupakan upaya untuk melindungi atau menjaga anak-anak aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Realisasi kinerja tahun 2019 dapat memenuhi target sebesar 100% dan dengan capaian sebesar 100%. Realisasi ini dihitung berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dapat ditangani tuntas sebanyak 102 kasus dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan 102 kasus yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

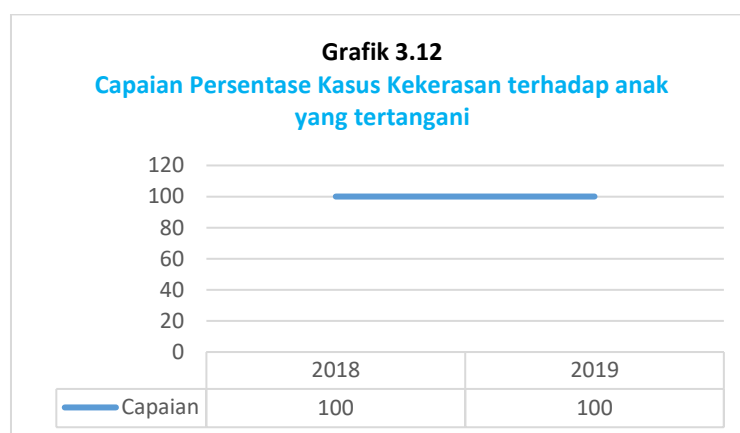
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 100% sama dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 100%, dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan meningkat dari tahun 2018 sebanyak 80 kasus dan tahun 2019 menjadi 102 kasus dan dengan harapan setiap kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan tuntas dan dapat berkurang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada akhir periode Renstra tahun 2022.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan dinas terkait di kabupaten/kota serta lembaga masyarakat juga dengan KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang peduli terhadap anak-anak yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.11. berikut:



Dari Grafik 3.11 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yakni 100%, begitu juga perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sama, dapat dilihat pada Grafik 3.12 berikut:



Dari Grafik 3.12 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 sama dengan dengan capaian tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung selalu tercapainya kinerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini karena adanya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang

selalu melakukan koordinasi dengan dinas atau unit dan lembaga masyarakat lainnya yang terkait di kabupaten/kota.

Pencapaian IKU Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang tertangani tahun 2019 didukung penggunaan dana dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar Rp206.499.600 atau 75,51% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp273.475.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 75,51%.
- b. TOT Bagi Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATB) Tingkat Kabupaten/Kota, sebesar Rp203.601.200,- atau 93,39% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp218.020.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 93,39%.

Secara agregat sasaran ini juga dapat dicapai secara efisien, dapat terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 83,44%.

“Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Capaian Pemenuhan Akan Hak-Hak Anak

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis Meningkatkan Capaian Pemenuhan Akan Hak-Hak Anak adalah persentase capaian tahapan provinsi layak anak.

Provinsi Layak Anak (Provila) merupakan sistem pembangunan yang berbasis pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Provila terdiri dari 2 (dua) kategori yakni Penggerak dan Pelopor. Provinsi dapat menjadi Provila

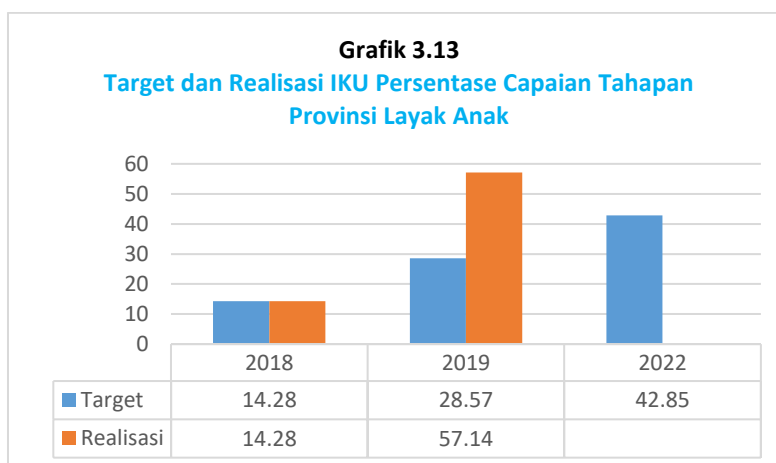
dengan kategori Pelopor apabila semua kabupaten/kota dalam provinsi tersebut sudah menjadi KLA dan Provila kategori Penggerak apabila semua kabupaten/kota dalam penilaian dapat mencapai nilai 500.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 57,14% dibandingkan dengan target sebesar 28,57% atau mencapai 200%. Realisasi ini dihitung berdasarkan penambahan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

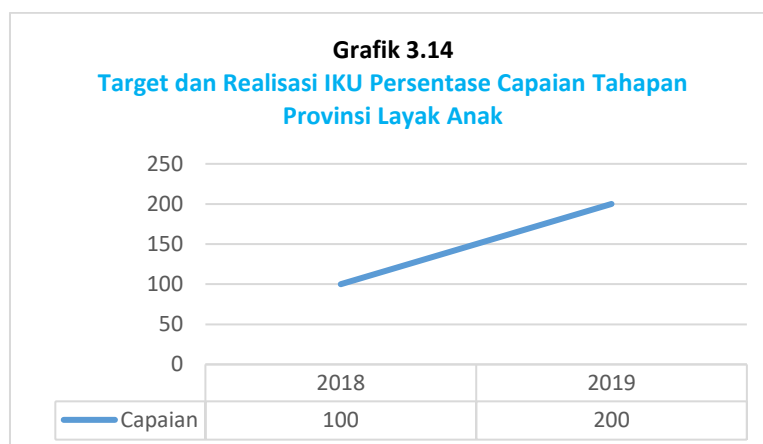
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 57,14% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 14,28% dan telah melampaui target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 42,85%.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melibatkan dinas yang membidangi di kabupaten/kota, baik dalam bentuk koordinasi, bimbingan dan pendampingan. Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir mendapatkan predikat Provila kategori Penggerak, dalam penilaian KLA semua kabupaten/kota sudah mendapatkan nilai lebih dari 500, hanya Kabupaten Belitung Timur yang tidak mencapai nilai 500.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.13 berikut:



Dari Grafik 3.13 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 sama dengan target yang ditetapkan dan tahun 2019 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari target akhir periode Restra tahun 2022, begitu juga perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat meningkat, dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut:



Dari Grafik 3.14 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 maupun dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam peningkatan jumlah kabupaten/kota untuk mendapatkan predikat KLA yang paling utama adalah komitmen yang kuat dari masing-masing Kepala Daerah sehingga dapat mendorong dan memotivasi semua pemangku kepentingan dapat bergerak bersama.

Pencapaian IKU Persentase Capaian Tahapan Provinsi Layak Anak tahun 2019 didukung penggunaan dana dari berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak), sebesar Rp174.477.509,- atau 93,49% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp186.620.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 93,49%.

- b. Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kabupaten/Kota, sebesar Rp73.913.500 atau 65,09% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp113.550.000,- bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 65,09%.
- c. Peningkatan Peranserta Anak Dalam Pembangunan, sebesar Rp210.054.474,- atau 93,75% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp214.459.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 93,75%.
- d. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila), sebesar Rp20.776.343,- atau 71,84% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp28.920.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 71,84%.
- e. Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak, sebesar Rp57.769.079,- atau 72,21% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp80.000.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 72,21%.

Secara agregat sasaran ini juga dapat dicapai secara efisien, terlihat dari capaian kinerja sebesar 200% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 84,68%.

“Sasaran Program 8

Meningkatnya dayaguna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis adalah:

1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan.
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan.

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

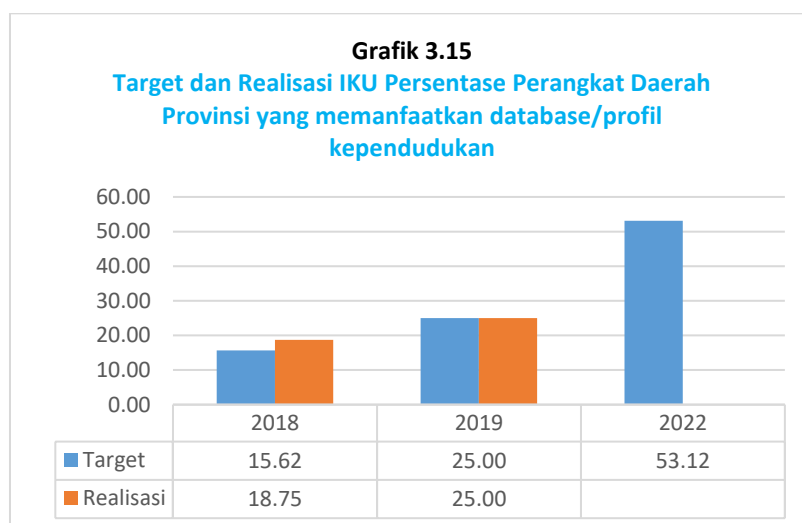
1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan, adalah penambahan jumlah dari PD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah memanfaatkan database/profil kependudukan secara rutin meminta data kependudukan.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 25,00% dibandingkan dengan target sebesar 25,00% atau mencapai 100%. Realisasi ini dihitung berdasarkan permintaan secara rutin dari 7 (tujuh) PD berkenaan dengan data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan dan pelaporan dari masing-masing PD tersebut.

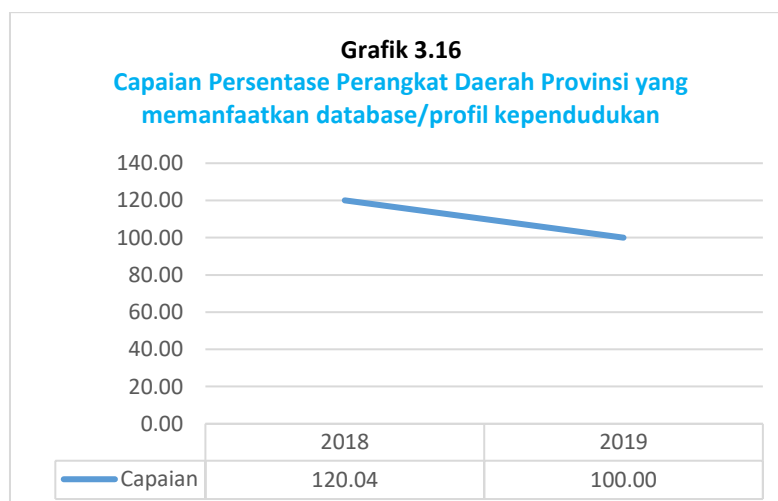
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 25,00% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 18,75% namun masih kurang sebesar 28,12% dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 53,12%.

Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya keinginan dalam penunggalan data oleh beberapa PD dengan basis data kependudukan juga dengan adanya kegiatan sosialisasi yang menghadirkan semua PD yang ada.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.15 berikut:



Dari Grafik 3.15 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari realisasi tahun sebelumnya, dan perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat menurun, dapat dilihat pada Grafik 3.16 berikut:



Dari Grafik 3.2 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018, namun masih mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam pemanfaatan data ini karena data kependudukan yang disajikan sudah valid dan terus merjalin komunikasi dengan semua PD yang baik dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi.

Pencapaian IKU Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan tahun 2019 didukung penggunaan dana dari kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp194.217.038 atau 88,00% dari anggaran sebesar Rp220.691.000,-, yang bersumber dari DAK, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 140,08% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 88,00%. Selain dari kegiatan PIAK (DAK) juga didukung dari kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan (APBN) dengan pendanaan sebesar Rp35.000.000,- atau 81,69% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp42.847.500,-. Secara agregat sasaran ini dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 140,08% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran dari kedua kegiatan di atas yakni sebesar 86,98%

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan, adalah rata-rata penambahan cakupan dari 5 (lima) jenis dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, dan Akta Kematian dari seluruh kabupaten/kota.

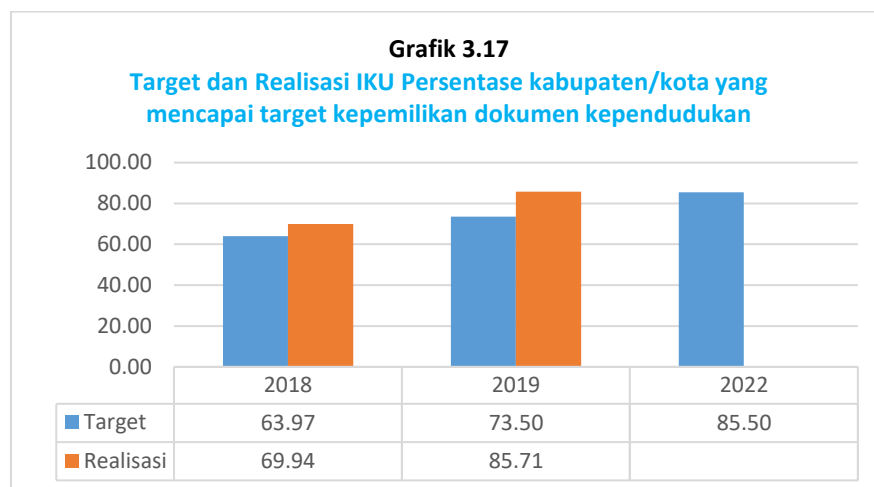
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 85,71% dibandingkan dengan target sebesar 69,50% atau mencapai 123,32%. Realisasi ini dihitung berdasarkan cakupan dari 5 (lima) jenis dokumen kependudukan yang dicapai oleh kabupaten/kota.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 85,71% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar

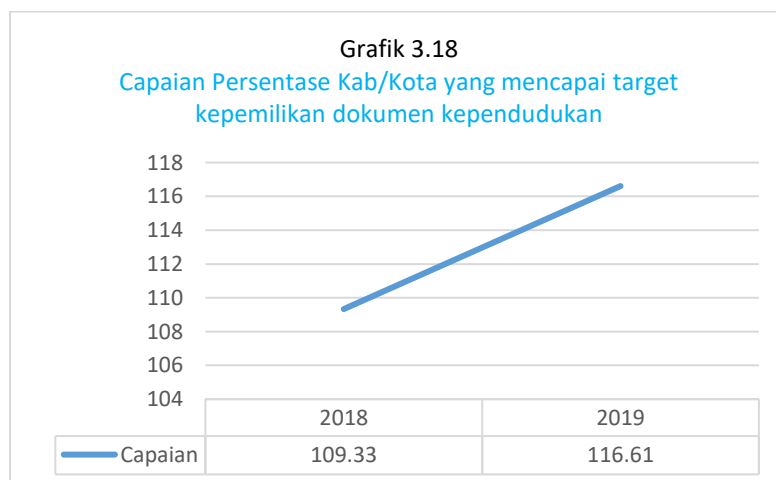
68,50% dan sudah melampaui sebesar 0,21% dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 85,50%.

Capaian sasaran program ini didukung oleh seluruh kabupaten/kota yang sering melakukan pelayanan jemput bola (stelsel aktif), dan bahkan seperti Kabupaten Bangka Barat melakukan program pelayanan 2 hari 1 malam di desa-desa.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.17 berikut:



Dari Grafik 3.17 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 dan 2019 melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan realisasi tahun 2019 dapat melebihi dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022, begitu juga dengan perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat meningkat, dapat dilihat pada Grafik 3.18 berikut:



Dari Grafik 3.18 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam capaian kepemilikan dokumen kependudukan, adanya kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan Kantor Wilayah Kemenag dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta giatnya kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan jemput bola.

Pencapaian IKU Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2019 didukung penggunaan dana dari 5 (lima) kegiatan yang didanai baik dari APBD maupun dari DAK, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di kabupaten/kota, sebesar Rp102.075.294 atau 78,52% dari anggaran sebesar Rp130.000.000,- yang bersumber dari DAK.
- b. Pembinaan kab/kota terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebesar Rp334.079.451,- atau 86,55% dari anggaran sebesar Rp386.000.000,- yang bersumber dari DAK.
- c. Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak, sebesar Rp19.250.000,- atau 67,19% dari anggaran sebesar Rp28.650.000,- yang bersumber dari APBD.
- d. Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk, sebesar Rp116.772.400,- atau 77,85% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,- yang bersumber dari APBD.

Secara agregat penggunaan anggaran baik APBD maupun DAK untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian IKU Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2019 sebesar Rp572.177.145,- atau sebesar 82,37%.

Sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 123,32% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 82,37%.

Secara tidak langsung Pencapaian IKU Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2019 juga didukung 4 (empat) kegiatan, yakni:

- a. Evaluasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar Rp216.033.900,- atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp227.427.000,- yang bersumber dari APBD.
- b. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil, sebesar Rp438.271.920,- atau 87,65% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,- yang bersumber dari DAK.
- c. Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar Rp17.731.400,- atau 60,41% dari anggaran sebesar Rp29.350.000,- yang bersumber dari APBD.
- d. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, sebesar Rp194.217.038,- atau 88,00% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,- yang bersumber dari DAK.

Secara agregat penggunaan anggaran baik APBD maupun DAK yang mendukung secara tidak langsung dalam pencapaian IKU Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2019 sebesar Rp870.140.710,- atau sebesar 90,94%.

Sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 123,32% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 90,94%.

“Sasaran Program 9

Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis adalah:

1. Persentase Tingkat Kesertaan ber-KB
2. Persentase Kampung KB yang Terbentuk

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

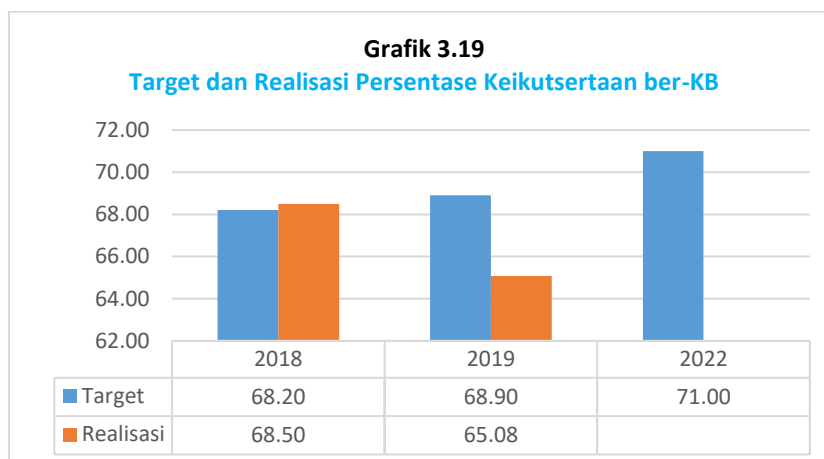
1. Persentase Tingkat Kesertaan ber-KB, merupakan angka tingkat kesertaan ber-KB atau CPR (*contraceptive Prevalence Rate*) yang membandingkan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah seluruh Pasangan Usai Subur (PUS) yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 65,08% dibandingkan dengan target sebesar 68,90% atau hanya mencapai 94,46%. Realisasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun.

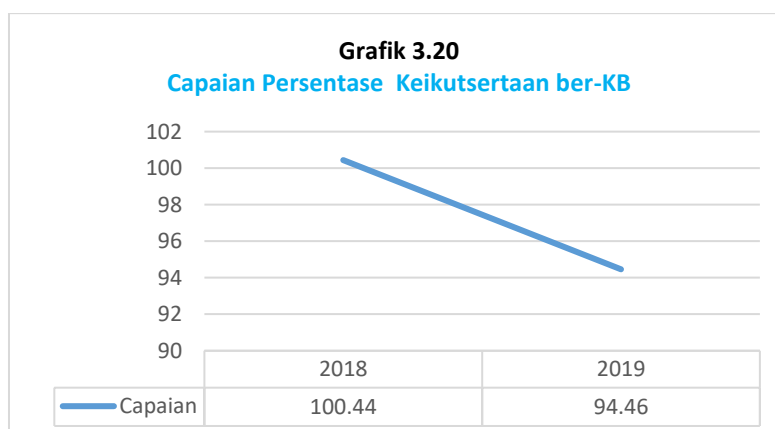
Realisasi kinerja tahun 2019 hanya sebesar 65,08% ini lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 68,50% sehingga celah kinerja (*performance gap*) semakin jauh sebesar 5,92% dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 71,00%.

Capaian sasaran program ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena saat ini ada kecenderungan banyak pasangan muda berpendidikan dari kalangan menengah yang ber-KB secara tradisional dan semakin bertambahnya PUS yang belum waktunya ber-KB.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.19 berikut:



Dari Grafik 3.19 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan, sementara tahun 2019 ini tidak dapat merealisasikan target tahun 2019 yang telah ditetapkan, sehingga ada celah kinerja sebesar 3,82% bahkan semakin besar celah kinerja jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 5,92%, begitu juga dengan perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat menurun, dapat dilihat pada Grafik 3.20 berikut:



Dari Grafik 3.20 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018, begtiu juga dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 tidak dapat dicapai.

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja ini karena semakin bertambahnya PUS yang belum waktunya untuk ber-KB dan ada

kecenderungan pasangan muda dari kalangan menengah lebih memilih ber-KB secara tradisional.

Pencapaian IKU Persentase keikutsertaan ber-KB tahun 2019 didukung penggunaan dana dari 5 (lima) kegiatan yang didanai dari APBD, sebagai berikut:

- a. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga, sebesar Rp224.767.000,- atau 86,98% dari anggaran sebesar Rp258.424.850,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 94,46% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 86,98%
- b. Advokasi dan KIE Program KBPK, sebesar Rp33.370.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp33.370.000,- yang bersumber dari APBD Perubahan, sasaran ini dicapai dengan cara tidak efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 94,46% lebih kecil dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 100%.
- c. Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan, sebesar Rp136.320.588,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp136.320.588,- yang bersumber dari APBD Perubahan, sasaran ini dicapai dengan cara tidak efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 94,46% lebih kecil dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 100%.
- d. Pemutakhiran Grand Design Kependudukan, sebesar Rp1.600.000,- atau 8,02% dari anggaran sebesar Rp19.950.000,- yang bersumber dari APBD Perubahan, serapan dana pada kegiatan ini sangat rendah namun sasaran ini dapat dicapai dengan baik, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 94,46% sementara capaian penggunaan anggaran hanya sebesar 8,02%.
- e. Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya, sebesar Rp141.253.000,- atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp144.909.000,- yang bersumber dari APBD, sasaran ini dapat dicapai dengan tidak efisien, hal ini terlihat

dari capaian kinerja sebesar 94,46% lebih kecil dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 97,48%.

Secara agregat penggunaan anggaran APBD untuk mendukung secara baik langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian IKU Persentase keikutsertaan ber-KB tahun 2019 sebesar Rp537.310.588,- atau sebesar 90,61%. Sasaran ini, secara agregat dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 94,46% lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran yang mendukung indikator ini yakni sebesar 90,61%.

2. Persentase Kampung KB yang Terbentuk, merupakan penambahan jumlah desa yang telah menjadi Kampung KB dari jumlah seluruh desa yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung KB.

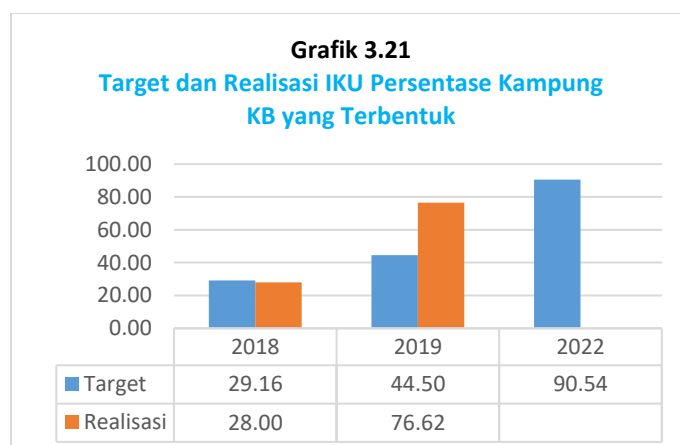
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 76,62% dibandingkan dengan target sebesar 44,50% atau mencapai 172,18%. Realisasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah desa yang telah menjadi Kampung KB dari jumlah seluruh desa yang memiliki kriteria tertentu.

Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 76,62% ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 28,00% namun masih kurang sebesar 13,92% dari target pada akhir periode Renstra tahun 2022 yakni sebesar 90,54%.

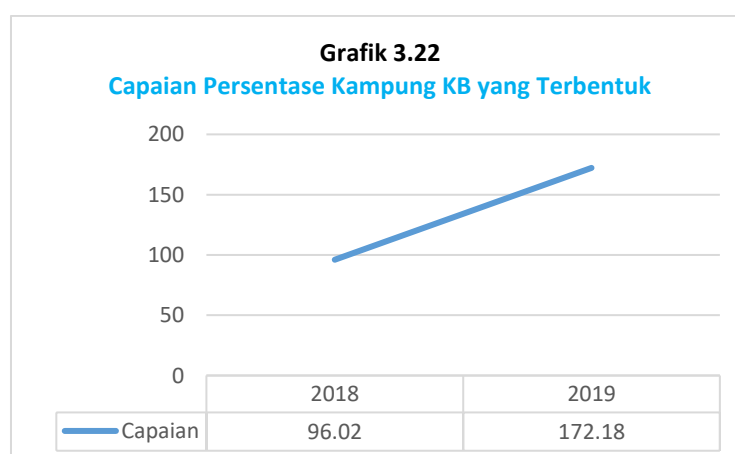
Capaian sasaran program ini didukung dengan adanya kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melibatkan dinas yang membidangi di kabupaten/kota juga sampai kepada kecamatan-

kecamatan, baik dalam bentuk koordinasi, bimbingan dan pendampingan.

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada Grafik 3.21 berikut:



Dari Grafik 3.21 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2018 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dan tahun 2019 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, namun realisasi tahun 2019 masih di bawah dari target akhir periode Restra tahun 2022, begitu juga perkembangan capaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat meningkat, dapat dilihat pada Grafik 3.22 berikut:



Dari Grafik 3.22 di atas terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 maupun dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam peningkatan terbentuknya jumlah Kampung KB adalah kerja sama yang baik dengan PD yang membidangi di kabupaten/kota dan para Kepala Desa dan perangkatnya yang sangat aktif berperan.

Pencapaian IKU Persentase Kampung KB yang Terbentuk tahun 2019 didukung penggunaan dana dari berbagai kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB, sebesar Rp141.253.000,- atau 97,48% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp144.909.000,- dari penggunaan anggaran yang besumber dari APBD, sasaran ini dapat dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 172,18% lebih besar daripada capaian penggunaan anggaran sebesar 97,48%.

C. Realisasi Keuangan

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar Rp16.317.955.087,- terealisasi sebesar Rp13.998.035.030,- atau 85,78% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi keuangan per program terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)*	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	8.353.949.019	7.115.351.015	85,17
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.793.803.250	2.480.398.655	88,78
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	749.802.000	634.821.500	84,67
4.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.508.069.000	1.198.694.959	79,49
5.	Program	1.914.966.000	1.671.535.113	87,29

	Pengadiministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	997.365.818	897.233.788	89,96
	Jumlah	16.317.955.087	13.998.035.030	85,78
	*APBD Perubahan			

Sebagai perbandingan penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp12.963.867.607,- terealisasi sebesar Rp11.774.607.391,- atau 90,83% dari anggaran.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp6.311.010.745,- dan terealisasi sebanyak Rp5.716.437.389,- atau 90,58%. Belanja langsung dianggarkan Rp6.652.856.862,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, dapat terealisasi sebanyak Rp6.058.170.002,- atau 91,06%.

D. Analisis Keuangan dengan Pencapaian Kinerja

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 85,78% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 169,34% dengan penggunaan dana sebanyak Rp13.998.035.030,- jika dibandingkan antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja, maka dapat dipastikan dalam penggunaan anggaran pada tahun 2019 diserap dengan sangat efisien.

Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2018 dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp12.963.867.607,- dapat terealisasi sebesar Rp11.774.607.391,- atau 90,83% dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 123,63% sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan secara efisien.

Jika dilihat dari perbandingan di atas maka dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun anggaran 2019 lebih baik dari tahun anggaran 2018.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
TOTAL BELANJA	Rp 15,739,673,014	Rp 16,317,955,087	Rp 13,998,035,030	85.78
BELANJA LANGSUNG	Rp 7,946,006,600	Rp 7,964,006,068	Rp 6,882,684,015	86.42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 7,793,666,414	Rp 8,353,949,019	Rp 7,115,351,015	85.17
Gaji Pokok PNS	Rp 2,766,875,300	Rp 2,827,176,800	Rp 2,322,157,570	82.14
Tunjangan Keluarga	Rp 216,063,792	Rp 220,911,597	Rp 198,535,148	89.87
Tunjangan Jabatan	Rp 287,420,000	Rp 287,420,000	Rp 279,170,000	97.13
Tunjangan Fungsional	Rp 27,720,000	Rp 29,720,000	Rp 25,040,000	84.25
Tunjangan Fungsional Umum	Rp 58,800,000	Rp 62,525,000	Rp 50,340,000	80.51
Tunjangan Beras	Rp 216,157,760	Rp 220,611,560	Rp 112,106,160	50.82
Tunjangan PPH/Khusus	Rp 6,446,762	Rp 23,255,109	Rp 14,957,785	64.32
Pembulatan Gaji	Rp 91,000	Rp 92,875	Rp 32,878	35.40
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS	Rp 66,562,003	Rp 68,413,423	Rp 19,153,652	28.00
Iuran Jaminan BPJS Kesehatan	Rp 114,626,547	Rp 117,814,047	Rp 64,961,964	55.14
Tunjangan Kinerja	Rp 3,778,967,250	Rp -	Rp -	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 219,000,000	Rp 4,461,072,608	Rp 4,007,359,858	89.83
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	Rp 34,936,000	Rp 34,936,000	Rp 21,536,000	61.64
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Rp 2,223,803,250	Rp 2,793,803,250	Rp 2,480,398,655	88.78
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2,027,193,250	Rp 2,591,193,250	Rp 2,329,593,555	89.90
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 74,050,000	Rp 80,050,000	Rp 60,022,300	74.98
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000	Rp 16,850,000	93.61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp 75,400,000	Rp 75,400,000	Rp 48,602,800	64.46
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29,160,000	Rp 29,160,000	Rp 25,330,000	86.87
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Rp 599,802,000	Rp 749,802,000	Rp 634,821,500	84.67
Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp 223,320,000	Rp 178,930,000	Rp 168,234,800	94.02
Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	Rp 204,900,000	Rp 204,900,000	Rp 144,410,000	70.48
Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Rp 84,800,000	Rp 84,800,000	Rp 65,995,200	77.82

Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota	Rp 57,112,000	Rp 54,612,000	Rp 53,167,000	97.35
Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 22,020,000	Rp 20,070,000	Rp 20,070,000	100.00
Pemetaan Industri Rumah Tangga di Kab/Kota	Rp 7,650,000	Rp 7,650,000	Rp 7,650,000	100.00
Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif		Rp 150,000,000	Rp 132,437,200	88.29
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender		Rp 48,840,000	Rp 42,857,300	87.75
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 1,208,069,000	Rp 1,508,069,000	Rp 1,198,694,959	79.49
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	Rp 186,620,000	Rp 186,620,000	Rp 174,477,509	93.49
TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota	Rp 218,020,000	Rp 218,020,000	Rp 203,601,200	93.39
Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	Rp 273,475,000	Rp 273,475,000	Rp 206,499,600	75.51
Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Rp 243,025,000	Rp 393,025,000	Rp 260,603,254	66.31
Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	Rp 43,550,000	Rp 113,550,000	Rp 73,913,500	65.09
Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	Rp 214,459,000	Rp 214,459,000	Rp 201,054,474	93.75
Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	Rp 28,920,000	Rp 28,920,000	Rp 20,776,343	71.84
Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	Rp -	Rp 80,000,000	Rp 57,769,079	72.21
PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 3,066,966,000	Rp 1,914,966,000	Rp 1,671,535,113	87.29
Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 227,427,500	Rp 227,427,500	Rp 216,033,900	94.99
Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 29,350,000	Rp 29,350,000	Rp 17,731,400	60.41
Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Rp 386,000,000	Rp 386,000,000	Rp 334,079,451	86.55
Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	Rp 102,075,294	78.52
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp 220,691,000	Rp 220,691,000	Rp 194,217,038	88.00
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	Rp 198,103,710	99.05
Pengembangan Bank Data Kependudukan	Rp 42,847,500	Rp 42,847,500	Rp 35,000,000	81.69

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	Rp 1,225,000,000	Rp -	Rp -	
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Rp 105,650,000	Rp 28,650,000	Rp 19,250,000	67.19
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 438,271,920	87.65
Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 116,772,400	77.85
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 847,366,350	Rp 997,365,818	Rp 897,233,788	89.96
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	Rp 258,424,850	Rp 258,424,850	Rp 224,767,000	86.98
Advokasi dan KIE Program KKBPK	Rp 35,012,500	Rp 33,370,000	Rp 33,370,000	100.00
Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Rp 158,200,000	Rp 136,320,668	Rp 136,320,588	100.00
Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Rp 230,870,000	Rp 404,391,300	Rp 359,923,200	89.00
Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	Rp 19,950,000	Rp 19,950,000	Rp 1,600,000	8.02
Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	Rp 144,909,000	Rp 144,909,000	Rp 141,253,000	97.48

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan terkait tugas fungsi kepada seluruh pihak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2019 penyerapan anggaran sebesar 85,78% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 169,34% dengan penggunaan dana sebanyak Rp13.998.035.030,- dari anggaran sebesar Rp16.317.955.087,-. Target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 di atas 100% kecuali pada indikator kinerja persentasi tingkat kesertaan ber-KB hanya mencapai 94,46%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan terobosan dalam mengemban tugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam upaya mewujudkan program pembangunan, sementara itu ada juga beberapa kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang dijumpai menjadi tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana demi tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.